

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2004, Kebijakan Publik, Jakarta Pancar Siwah.
- Adelina, Rima. "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 1.2 (2013).
- Ainur Rofiq, 2007. *Klasifikasi Belanja Daerah*. <http://www.Rofiq.web.id> (tanggal 5 Januari 2009)
- Anita Wulandari. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah*, Vol. 5, No. 2, November.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 2018, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jombang 2019*. BPS:2019
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bisma, I., Dewa Gde, and Hery Susanto. "Evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2003-2007." *Ganec Swara* 4.3 (2010): 75-86.
- BPKAD Kabupaten Jombang. [Jombangkab.go.id/index.php/page/detail/bpkad-struktur-organisasi.html](http://Jombangkab.go.id/index.php/page/detail/bpkad-struktur-organisasi.html) (diakses tanggal 1 Agustus 2018)
- Deddi dan Ayuningtyas. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Halim Abdul 2012, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta
- Halim, A, 2004, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Jatimtimes.com. (2020, 19 Agustus). Tiga Ranpenda Disetujui, P-APBD Jombang Bertambah Rp 137 Miliar, Diakses pada 20 Agustus 2020, dari

(<https://jatimtimes.com/baca/221434/20200820/102500/tiga-ranpenda-disetujui-p-apbd-jombang-bertambah-rp-137-miliar>)

- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, Oktober, 1976.
- Jones, Charles O.1996. Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy) Terjemahan Ricky Ismanto, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Josef Riwo Kaho. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Drajat Tri. 2006. “*Reformasi Administrasi: dari Reinventing ke Pesimisme*” Dalam Jurnal Spirit Publik Volume 2, No 1, April 2006, hal 51-62
- Katit, Fransiskus XW, and Sherly Pinatik. "Analisis Kinerja Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4.3 (2016).
- Machfud Sidik dkk.2002. *DAU, Konsep, Hambatan, dan Prospek di era Otonomi*. Jakarta: Buku Kompas
- Mahmudi, 2010, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo , 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik* Edisi keempat, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Moleong. Lexy J, (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosda Karya.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta. Erlangga.
- Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian ( Bandung: Sinar Baru,1989),hlm.84
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah No 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- Pramiana, O., Umroh, F., Mellenio, A. P., & Mustofia, A. (2021). Minat Berprofesi Di Bidang Perpajakan Sebelum Dan Sesudah Mengikuti Brevet Pajak. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 1(2), 144-149.
- Sanafiah Faesal, Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).hlm.42-43
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabet, Bandung.
- Suyatin, Rani Febri Ramadani, and Elfreda Aplonia Lau. "Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Permerintah Kota Samarinda." *Ekonomia* 5.3 (2016): 225-239.
- Tamboto, Laedy, Jenny Morasa, and Lidia Mawikere. "Analisis kemampuan keuangan daerah dalam masa otonomi daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2.2 (2014).
- Tjandra riawan 2013: *Hukum keuangan Negara* PT. Grasindo , 2013, Jakarta
- Undang-Undang No.33 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Viara, Rika, and Lilik Pujiati. "Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Untuk membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Jombang." *JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara* 2.1 (2019): 11-23.
- Wahyuni, Sri. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008. (TIMES, 2020)
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Edisi revisi, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.